



AN NATIQ

Jurnal Kajian Islam dan Interdisipliner

KEBIJAKAN PERBERASAN DALAM KAJIAN ISLAM ○
Oleh: Badat Muwahhid

MEMILIH PEMIMPIN DALAM PILKADA ○
Oleh: M. Bashori Muchsin

PEREMPUAN MENJADI LEADER ANTI KORUPSI ○
Oleh: Bambang Satriya

PENEGAKAN HAM, PELAJARAN DARI TRAGEDI CRANE ○
Oleh: Abdul wahid

PERANG MELAWAN TERORISME GLOBAL ○
Oleh Misranto

PEMASARAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM ○
Oleh: Noor Shodik Askandar

PERADILAN EGALITER DALAM PERSPEKTIF ISLAM ○
Oleh: Mariyadi

REKONSTRUKSI KEKUASAAN BERBASIS NASIONALISME KEINDONESIAAN ○
Oleh: Siti Marwiyah

**MEMUTUS REGENERASI ISIS DENGAN PEMBUMIHAN PENDIDIKAN ANTI
KEKERASAN** ○
Oleh: Muzamil

AN NATIQ

Jurnal Kajian Islam dan Interdisipliner

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR • ii

DAFTAR ISI • iii

1. KEBIJAKAN PERBERASAN DALAM KAJIAN ISLAM

Oleh: Badat Muwakhid • 1

2. MEMILIH PEMIMPIN DALAM PILKADA

Oleh: M. Bashori Muchsin • 8

3. PEREMPUAN MENJADI LEADER ANTI KORUPSI

Oleh: Bambang Satriya • 16

4. PENEGAKAN HAM, PELAJARAN DARI TRAGEDI CRANE

Oleh: Abdul wahid • 23

5. PERANG MELAWAN TERORISME GLOBAL

Oleh Misranto • 31

6. PEMASARAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Oleh: Noor Shodik Askandar • 39

7. PERADILAN EGALITER DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Oleh: Mariyadi • 48

8. REKONSTRUKSI KEKUASAAN BERBASIS NASIONALISME KEINDONESIAAN

Oleh: Siti Marwiyah • 57

9. MEMUTUS REGENERASI ISIS DENGAN PEMBUMIHAN PENDIDIKAN ANTI KEKERASAN

Oleh: Muzamil • 65

REKONSTRUKSI KEKUASAAN BERBASIS NASIONALISME KEINDONESIAAN

Oleh: Siti Marwiyah

Dekan Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Abstract

Power synonymous with having run norms to realize the interests of the people. The rulers who get the confidence to realize the people's interests into the attitude parameters of nationalism in Indonesia. The ruling is identical to carry out the mandate of which is also set in the norms of Islam. This power is the key mandate that affects people's lives objectivity.

Keywords: *people, power, nationalism*

PENDAHULUAN

"Kekuasaan bukanlah segala-galanya, tetapi kekuasaan wajib bertanggungjawab penuh atas segala problematika yang dihadapi oleh rakyat, karena rakyat adalah segalanya bagi setiap pemegang kekuasaan".¹

Kalau saja setiap elemen bangsa yang berbeda keyakinan dan agama di negeri ini benar-benar menunjukkan sikap persaudaraan inklusif, yang saling terbuka dalam menghormati perbedaan, tentulah pola kekerasan yang mengorbankan nyawa orang atau pemeluk agama lain seperti di Tolikara tidak perlu terjadi. Kalau setiap elemen kekuasaan memahami dengan benar makna nasionalisme, barangkali rakyat dibawah atau di daerah pedalaman tidak akan sampai bergolak atau rentan melakukan radikalisme.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat mudik ke Solo menanggapi konflik yang terjadi di Tolikara. Presiden Jokowi menyatakan bahwa situasi di Tolikara sudah terkendali, di samping Jokowi mengingatkan untuk selalu menjaga kerukunan antarmasyarakat. Tidak hanya di Papua, tapi juga di seluruh Indonesia. Sebab, negara Indonesia merupakan negara yang majemuk dan multikultur.

Meski Jokowi sudah mengingatkan seperti itu, apakah ada jaminan kalau radikalisme agama sudah selesai atau tidak akan terulang kembali? Tentu saja tidak ada siapapun diantara pemimpin di negeri ini yang memberikan jaminan kalau kekerasan agama tidak akan terjadi lagi di masa-masa mendatang.

¹Sofwan Idrus, *Kekuasaan, Kerakyatan, dan Kebangsaan*, Lembaga Pengkajian Kebangsaan Republik Indonesia (LPKRI), Jakarta, 2013, hal. 2.

Menilik sejarah kemanusiaan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan adalah sebuah fenomena real yang pada prinsipnya memiliki kodrat perbedaan dalam status sosial kehidupan, perbedaan itu sudah menjadi hal yang niscaya yang patut kemudian diakui oleh kita semua dan yang terpenting bagi kita adalah kemampuan berpikir bagi kita dalam menyikapi kehidupan untuk senantiasa bisa bersikap rukun dan damai dalam konteks persatuan dan kesatuan sebagaimana yang termuat dalam filosofi sejarah bangsa, Indonesia merupakan negara yang terbentuk atas berbagai suku dan kepercayaan yang kultur kemanusiaannya terbingkai dalam satu semangat juang dalam memerdekakan kehidupan yang adil dan beradab.² Memerdekakan kehidupan dari belenggu otoritas negara yang represif sudah demikian sering dan bahkan lama terjadi di bumi pertiwi ini.³

Sejarah telah banyak merekam fenomena alam yang terjadi dalam kehidupan umat manusia dewasa ini tentang berbagai persoalan, konflik, politik, agama dan kekuasaan adalah menjadi penyebab terjadinya diskriminasi hak dan kemerdekaan hidup, walaupun politik, agama dan kekuasaan sebenarnya tidak sebagaimana yang diasumsikan namun itu akan bisa terjadi apabila pengetahuan manusia hanya bercerita tentang persoalan kebenaran yang belum tentu pasti sumber datangnya kebenaran tersebut.⁴ Problem bangsa menjadi demikian sengkarut akibat pengaturan dan penegakan tentang hak kurang menjadi perhatian serius. Negara tidak berperan sebagaimana keharusan yang diamanatkan oleh konstitusi, melainkan sebatas dipaksakan mewakili kepentingan eksklusif individu dan kelompok.⁵

Sebuah pemahaman yang mengakar akan mengantarkan manusia pada penentuan tentang pola pengaturan yang bijaksana lagi sistematis dengan adanya pola tersebut kita akan lebih mudah menjelaskan makna-makna yang dianggap berpotensi memicu terjadinya keretakan dan konflik ras, suku dan agama dengan itu peranan kita dalam menyadarkan masyarakat adalah sebuah keharusan yang wajib dilakukan guna mengawal proses pencerdasan, kontribusi intelektual menjadi penting untuk dikemas secara baik dalam mengaktualkan ide serta gagasan terhadap situasi jaman yang jauh dari sentuhan-sentuhan intelektual. Dalam pengambilan sebuah tindakan manusia selalu menggunakan barometer pertimbangan serta sikap orientasi dalam mensimbolkan dirinya sebagai mahluk yang berpolitik dengan legitimasi akan ketangguhan serta kesanggupannya memimpin orang lain atau kelompoknya.⁶ Ketika sikap mental demikian ini bergandengan atau berseberangan dengan elemen atau kekuatan tertentu dalam dunia politik, akhirnya masing-masing terseret dalam pengasabsahan "demi negara".⁷

PEMBAHASAN

Paradigma Kemanusiaan

Kedamaian dalam perbedaan atau keragaman dalam konstruksi keadaban bukanlah sesuatu yang mustahil untuk dirasakan bersama, bilamana setiap elemen masyarakat saling menyadari kalau sejatinya, mereka saling membutuhkan atas keberlanjutan hak hidup.

²Syahrul Al-Walid, *Konflik dan Kekuasaan dalam Paradigma Kebangsaan*, <http://sahrulesa.blogspot.co.id/2013/09/konflik-dan-kekuasaan-dalam-paradigma.html>, 2 September 2015.

³Masruro Hanan, *Negara yang Menyebarkan Ranjau*, Kumpulan Makalah, Surabaya, 2013, hal. 2.

⁴Syahrul Al-Walid, *Loc. Cit.*

⁵Sofwan Idrus, *Op.Cit.*, hal. 3.

⁶Syahrul Al-Walid, *Loc. Cit.*

⁷Istilah "demi Negara" ternyata bukan hanya digunakan sebagai politik stigma di rezim Orde Baru, tetapi di rezim Orde Reformasi pun, sering digunakan dengan konotasi atau penggunaan kata yang berbeda, Masruro Hanan, *Op.Cit.*, hal. 3.

Kita sampai sekarang terbukti masih jalani hidup yang sedang mengidap krisis harmoni sosial. Kita rentan memossikan diri dalam ranah saling berhadapan dan merasa tak berada dalam satu bangunan yang mengokohkan jiwa ke-Indonesiaan. Kita sedang gagal menikmati pelayaran sebuah "kapal besar" yang secara tidak langsung membentuk sikap saling menyayangi dan menjunjung tinggi keragamann.

Begitu banyak persoalan kebangsaan yang melanda dunia modern dalam konteks kekinian pun yang akan datang yang menyebabkan manusia terbunuh secara mental dan psikologis, pembantain tersebut banyak diakibat oleh arus kepentingan yang bergejolak dahsyat, sehingga persoalan kemanusiaan diabaikan tanpa mengedepankan rasa kasih-sayang antar sesama.⁸ Gejolak gampang tersulut oleh masalah yang barangkali di mata negara dinilainya sangat sepele, namun di mata masyarakat, khususnya masyarakat akar rumput sebagai problem fundamental.⁹

Pada umumnya keresahan yang terjadi di masyarakat itu lebih dominan diletakkan pada persoalan membiarkannya ketidakteraturannya kondisi bangsa, para politisi lebih banyak menghabiskan waktu untuk berbicara pada persoalan kedudukan dan jabatan, sehingga nasib rakyat terancam terbunuh, simpang siurnya para stekholder dalam mengambil sikap untuk menagatur tata pembangunan serta kesadaran masyarakat yang kurang sempurna, perilaku ini samasekali tidak memperlihatkan contoh yang layak untuk diteladani dan sebaliknya tindakan itu mencetak pribadi-pribadi yang tidak berprikemanusiaan. Berbagai kasus yang belum dituntaskan dengan baik katakanlah misalnya kasus korupsi yang meraja lelah, pertikaian yang makin meningkat, banyaknya klaim-klaim kebenaran yang pada akhirnya menyebabkan saling membunuh satu-sama lain. Kaum agamawan yang memaknai agama pada sebatas kegiatan-kegiatan ritual, agama hadir dimuka bumi ini sebagai manifestasi atas meluasnya mahluk dalam semesta yang sikapnya tentu berbicara kepada hal-hal sosial.¹⁰

Kepentingan fundamental masyarakat sudah sering dikoyak oleh sikap arogansi merasa behar sendiri (*truth claim*) dari sekelompok orang, sekelompok pemeluk agama, elemen pemimpin kelompok atau sejumlah orang dibalik jubah keyakinan atau target ideologi eksklusifnya sebagai kepentingan istimewa dan absolut yang tidak bisa digeser oleh kepentingan maslahat umat.

Pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan terus berulang. Pengoyakan hak ini mencerminkan berjayanya tangan-tangan kotor, yang membuat peta kehidupan bermasyarakat dan bernegara sarat dengan gesekan dan atmosfir saling berhadapanyang bisa dengan mudah tergiring pada ranah radikalisme dan ekstrimisme lebih masif

Sebagian elite yang memang berada di ranah piramida kekuasaan pun masih menjadi manusia-manusia yang gagal memimpin (mengendalikan) dan mehumanisasikan diri, karena mereka masih menjatuhkan opsi egoisme sektoral, kelompok, dan merasa paling bertuhan atau melegalitaskan klaim paling benar dan berkuasa (bernegara) tanpa memberi ruang bagi yang lain untuk berbeda dan berdemokrasi secara beradab.¹¹

Sebagian diantara kita bahkan sering sekali mematikan atau menghilangkan apa yang disebut Anshari Thayib "paradigma kemanusiaan" (*an-naz'ah al-insaniyah*). Apa yang kita lakukan dari hari ke hari makin mengakibatkan tercerabutnya dan punahnya komitmen

⁸ Syahrul Al-Walid, *Loc. Cit.*

⁹ Sofwan Idrus, *Op.Cit.*, hal. 11.

¹⁰ Syahrul Al-Walid, *Loc. Cit.*

¹¹ Masruro Hanan, *Op.Cit.*, hal. 4-5.

persaudaraan kemanusiaan. Harkat manusia di mata manusia lainnya tak lebih dari obyek yang dihalalkan darahnya tumpah akibat amarah yang dikedepankannya.¹²

Tidak sedikit kasus yang terjadi di tengah masyarakat yang mendeskripsikan, bahawa hanya karena gesekan persoalan kecil atau masih belum jelas akar problematikannya, kita gigih saling menabur brutal, jegal dan jagal dengan sesama pemeluk agama atau mereka yang berlainan agama.

Menyikapi salah satu akar kekerasan agama yang berelasi pada masalah ketidakadilan ekonomi atau disparitas sosial, pencairan kondisi supaya menjadi progresif dan kondusif, serta humanistik harus dilakukan sekelompok orang yang pernah menciptakan kondisi ketimpangan, ketidak-adilan, dan ketidak-adaban terhadap elemen masyarakat itu.

Upaya itu akan merekonstruksi makna persaudaraan tidak hanya terbatas dalam ranah individual, tetapi juga ranah sosial, kultural, dan struktural, serta kebangsaan. Berbagai dimensi ini bisa saja dimasuki oleh setiap elemen yang menjadi pelaku dalam konstruksi kehidupan bernegara dan bermasyarakat ini, manakala mereka memang mempunyai komitmen untuk mewujudkannya.

Di hadapan sahabat-sahabatnya, Nabi Muhammad SAW menceritakan peristiwa ganjil yang akan terjadi di akhirat kelak. Katanya, "ada serombongan orang yang pakaian dan wajahnya tampak bersinar dan bercahaya. Mereka ini mengundang rasa takjub para Nabi dan pejuang yang mati syahid". "Siapakah mereka yang mendapat keistimewaan di hari Perhitungan itu?", tanya sahabat-sahabatnya. "Mereka merupakan kumpulan orang-orang yang semasa di dunia telah menjalin persaudaraan yang suci, tak dijangkiti sifat dengki, amarah, dendam, sakit hati, saling menyakiti dan menzalimi yang lain dengan tangannya".

Hikayat tersebut mengajarkan, agar sesama manusia tidak menghalalkan sifat kedengkian, dendam, menganiaya dan apalagi menghabisi sesamanya. Sifat tak terpuji harus steril dari bangunan persaudaraan, sedang sifat-sifat mulia harus selalu dimenangkan dan dikembangkan supaya antar sesama bisa saling menerima dengan kebeningan nurani.

Pesan kenabian itu mengajak masing-masing komponen bangsa untuk menempatkan sifat-sifat terpuji sebagai "pakaian" yang menjaga aurat diri, sesama dan bangsa. Sifat inilah yang akan mengantarkan dirinya sebagai pemenang sejati (*muflihun*) di hadapan Allah. Kemenangan sejati ditentukan oleh model pergaulan yang dikonstruksinya, khususnya model relasi negara (kekuasaan) dengan rakyat.

Pendekatan Islam terhadap Hak Perlakuan secara Humanitas

Hal itu artinya kebahagiaan atau "hari kemenangan" di akhirat nanti akan berhasil diperolehnya bilamana manusia mampu mengonstruksi persaudaraan kemanusiaannya dengan cinta. Cinta inilah yang dapat memediasi dan mengintegrasikan perbedaan etnis, ketak-sepahaman visi dan disparitas kepentingan golongan. Kemenangan itu tentu saja menjadi bagian dari wujud bangunan persaudaraan manusia di dunia yang berhasil diimplementasikan.

"Tak disebut beriman diantara kalian, sehingga mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri", demikian penegasan Nabi Muhammad SAW yang mengajak manusia untuk selalu merajut dan mengonstruksi persaudaraan kemanusiaannya dengan cinta.¹³ Persaudaraan ini diantaranya dapat diwujudkan dengan membangun nasionalisme

¹²*Ibid.* hal. 5.

¹³Sahid Samawa, *Membumikan Teologi Kemansiaan dalam Kehidupan Bernegara*, Makalah, Jakarta, 12 Agustus 2014, hal.1.

keindonesiaan. Penguasa menempati pos terbesar dalam upaya mewujudkan persaudaraan ini, karena penguasa merupakan pengatur dan pengelola modal bangsa.

Hadis tersebut juga menggariskan, bahwa doktrin "cinta" yang diajarkan Nabi merupakan doktrin melintas batas sekat sosial, kultural, agama, individual, struktural, dan lain sebagainya, yang berporos pada kepentingan universal.

Manusia yang terikat dalam doktrin universalitas itu dibebani kewajiban untuk mengembalikan (merehabilitasi) kondisi terburuk yang pernah diprodukannya menjadi kondisi yang lebih memanusiakan, dan memartabatkan. Manusia disini adalah pemegang kekuasaan atau yang merepresentasi sebagai instrumen negara.

Perlu diketahui, menurut Ramlan Surbakti,(1992), bahwa kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan, kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh¹⁴ atau kemampuan seseorang atau kelompok untuk memengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku atau Kekuasaan merupakan kemampuan memengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang memengaruhi¹⁴

Dalam pembicaraan umum, kekuasaan dapat berarti kekuasaan golongan, kekuasaan raja, kekuasaan pejabat negara. Sehingga tidak salah bila dikatakan kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. Robert Mac Iver mengatakan bahwa kekuasaan adalah kemampuan atau kekuatan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain baik secara langsung dengan jalan memberi perintah dengan jalan menggunakan semua alat dan cara yang tersedia. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan, ada yang memerintah dan ada yang diperintah. Manusia berlaku atau memosisikan atau diposisikan sebagai subjek sekaligus objek dari kekuasaan.¹⁵

Pemaknaannya kita terhadap negara dalam konteks kebangsaan merupakan sebuah ilustrasi yang didesain oleh penguasa dalam memajukan Negara bangsa (*Nation State*) terhadap konteks jaman, pengaruh ekonomi global terhadap kesejahteraan rakyat itu belum mampu menuntaskan kemiskinan yang ada justru sebaliknya bahwa masyarakat yang menjadi hegemoni massal oleh penguasa, kejadian itu terus terjadi dalam kehidupan umat manusia dewasa ini.¹⁶ Kondisi kehidupan masyarakat belum menunjukkan perubahan kuat dalam bidang kesejahteraan. Negara belum memberikan perhatian maksimal diantaranya dengan cara mendekonstruksi segala jenis penyakitnya.¹⁷

Berbicara soal konflik adalah sebuah konsepsi yang menjadi penting terhadap wacana gerakan, seiring dengan adanya semangat perubahan dalam watak politik penguasa dan radikalisme agama terhadap ideologi ideologi tertentu dalam mewujudkan konsepsi pemikiran, namun atas dasar ini yang cenderung tidak stabil dalam fakta empiris perjuangan, ketidak seimbangannya tindakan dengan konsepsi dalam mencapai titik akhir dari perubahan mengandung adanya kelemahan yang harus direkonstruksi dengan paradigma yang mengarah

¹⁴Nurrahman Alif, *Islam dan Kekuasaan*, Mitra Pustaka, Surabaya, 2011, hal. 2.

¹⁵*Ibid*, hal. 2-3.

¹⁶Syahrul Al-Walid, *Loc. Cit.*

¹⁷Berbagai kasus seperti maraknya kejahatan konvensional yang pelakunya berasal dari kalangan akar rumput menjadi bukti, bahwa negara atau penguasa masih alpa atau belum maksimal dalam menjalankan kekuasaan yang berbasis nasionalisme kerakyatan, Sahid Samawa, *Op.Cit*, hal. 7.

pada upaya perbaikan serta resolusi akan masalah yang mengancam nilai-nilai kemanusiaan.¹⁸ Mendekonstruksi kelemahan atau kekurangan umumnya diikuti dengan perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh negara di berbagai bidang yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat.¹⁹ Kekuasaan bertanggungjawab terhadap terwujud tidaknya hak-hak rakyat. Rakyat akan mampu jalani hidup dalam keharmonisan atau kedamaian, adalah berkat peran sah kekuasaan.²⁰

Sebuah kesadaran yang lahir dalam jiwa pejuang itu harus lebih bersikap optis dalam menciptakan perubahan bukan radikalisme, tercapainya sebuah misi yang besar guna mengawal masa depan bangsa dan agama terletak pada kesadaran dalam belajar dan terus melakukan pendampingan serta rasionalisasi ke arah yang maju dan mencerdaskan. Revolusi yang besar adalah meluruskan paradigma berpikir yang tentunya bukan sekedar melihat adanya simbol kolektifitas tetapi sejauh mana setiap elemen sosial bisa menunjukkan komitmen dalam mengikuti alur berpikir yang melingkupi semua kepentingan bangsa dan agama.²¹ Setiap elemen bangsa memang dituntut menunjukkan amanat sesuai dengan "pos" kekuatan atau kekuasaannya masing-masing, jika mereka ini mengobsesikan terwujudnya perubahan di tengah kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.²²

Kontrol kekuatan sebagai landasan filosofis dalam membangun gerakan perubahan menjadi modal kuat dalam menstimulus arah perjuangan, arus kepentingan yang bertarung dalam memanfaatkan kondisi politik terlihat begitu rapi dalam memainkan peranannya terhadap ilustrasi kehidupan. Cara penguasa dalam mengelola hingga melanggengkan kekuasaan politik dengan bertampil sebagai tokoh agamawan berbicara atas nama Tuhan dalam membohongi atau membodohi masyarakat guna melegalkan dirinya sebagai orang alim/ustad semata-mata karena kepentingan politik dan bahkan sebuah hal yang biasa terjadi membuat masyarakat risau, mensetting keadaan ekonomi masyarakat agar masyarakat mendewakan penguasa dalam konteks politik demokrasi.²³

Kalau kondisi tersebut bisa direkonstruksi dengan menggunakan tangan-tangan sucinya (para penguasa), maka perubahan besar dalam kehidupan bermasyarakat yang diwarnai oleh persaudaraan universal, bukanlah hal mustahil. Sebaliknya, kalau tangan-tangan kotor saja yang dimenangkan atau dibiarkan berjaya, maka sulit mengharapkan terbentuknya atmosfir persaudaraan yang saling memanusiaikan.

Kondisi masyarakat yang carut marut akibat ketidakberdayaan, yang ketidakberdayaan ini, tidak lepas dari pengaruh tangan-tangan kotor atau keji yang sering dilakukan oleh sejumlah elitis kekuasaan, sudah seharusnya mereka diperlakukan sebagai kondisi "darurat" yang membutuhkan kesigapan atau kecermatan komunitas elitis untuk mereformasinya.

Nasionalisme haruslah diikur dari upaya dan implementasi tugas, kewenangan, atau kewajiban setiap elitis untuk menunjukkan yang terbaik atau memberikan yang sebesar-besarnya demi rakyat. Mereka harus merasa berdosa besar jika tidak mampu memberikan yang terbaik pada rakyat. Mereka juga harus merasa belum memiliki kadar nasionalisme yang tinggi, jika yang diberikannya pada bangsa ini, masih ala kadarnya.

¹⁸Syahrul Al-Walid, *Loc. Cit.*

¹⁹Sofwan Idrus, *Op.Cit*, hal. 4.

²⁰Nurrahman Alif, *Op.Cit*, hal. 1

²¹Syahrul Al-Walid, *Loc. Cit.*

²²Nurrahman Alif, *Op.Cit*, hal. 2

²³Syahrul Al-Walid, *Loc. Cit.*

Kalau cara itu terus dilakukan, maka akan terbentuklah iklim yang semakin sehat di negeri ini, dan bukannya iklim sosial yang mengandung kerentanan atau berpenyakit, yang suatu saat bisa menyebarkan dan meledakkan penyakit friksi radikal antar kelompok, yang disebut oleh Thomas Hobbes dengan *bellum omnium contra omnes* (kelompok yang satu saling bertikai dan menghabisi kelompok lain).²⁴

Kondisi sosial yang sehat itu makin mudah terkonstruksinya, bilamana negara (kekuasaan) ini menunjukkan sikap tegas dengan cara mendisain penyelenggaraan kekuasaan yang berbasis inklusifitas.

Kalau kita tidak menggunakan kekuasaan dengan baik itu akan terlenta dan sewenang-wenang dengan kekuasaan tersebut dianggap manusia itu kecil derajatnya. Kekuasaan artinya bisa mengayomi seluruh manusianya tidak menggangap orang lain rendah derajatnya, bukan menurunkan derajatnya. Kekuasaan bukan identik dengan kekerasan terhadap orang lemah akan tetapi merangkul orang yang lemah, dan menerima setiap saran orang lain, manusia butuh sesama bukan menjatuhkan.²⁵

Negara harus berani dan bersifat terus menerus mengajak kelompok minoritas dari ranah elitisme yang digdaya dalam keteralinasian dan eksklusifitasnya menuju ranah komunitas elitis yang egalitarian yang rajin menjalankan kewajiban strukturalitas dan humanitasnya secara maksimal dalam memedulikan saudaranya yang sedang kehilangan keberdayaannya secara sosial dan ekonomi.

KESIMPULAN

Kekuasaan identik dengan keharusan menjalankan norma-norma untuk mewujudkan kepentingan rakyat. Para penguasa yang mendapatkan kepercayaan untuk mewujudkan kepentingan rakyat menjadi parameter sikap nasionalismenya pada Indonesia. Sikap nasionalisme diukur dengan besarnya atau kesungguhannya dalam menjalankan amanat. Amanat yang ditegakkan sesuai dengan sumpah jabatan sebagai abdi negara, adalah penentu nasionalismenya.

Hal itu menunjukkan, bahwa para penguasa ini identik dengan menjalankan amanat yang juga diatur dalam norma agama Islam. Agama Islam menentukan, bahwa amanat kekuasaan ini menjadi kunci yang berdampak terhadap obyektifitas kehidupan rakyat. Ketika di tengah masyarakat ternyata masih banyak problem ancaman disintegrasi, kekerasan di kalangan orang miskin, dan lainnya, maka demikian ini mengindikasikan kalau mereka belum menunjukkan integritasnya sebagai pengembal amanat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Makalah

- Ghifari Rahman, *Bernegara Tanpa Rakyat (Refleksi Kasus Ketidakberdayaan Rakyat)*, Lembaga Kajian untuk Rakyat Indonesia, Surabaya, 2013.
 Nurrahman Alif, *Islam dan Kekuasaan*, Mitra Pustaka, Surabaya, 2011.
 Masruro Hanan, *Negara yang Menyebar Ranjau*, Kumpulan Makalah, Surabaya, 2013

²⁴ Ghifari Rahman, *Bernegara Tanpa Rakyat (Refleksi Kasus Ketidakberdayaan Rakyat)*, Lembaga Kajian untuk Rakyat Indonesia, Surabaya, 2013, hal. 2.

²⁵ Asri Firmansyah, *Paradigma Kekuasaan*, http://www.kompasiana.com/www.beritafoto.com/paradigma-kekuasaan_550aae438133110078b1e257, akses 2 September 2015.

Sahid Samawa, *Membumikan Teologi Kemansiaan dalam Kehidupan Bernegara*, Makalah, Jakarta, 12 Agustus 2014.

Sofwan Idrus, *Kekuasaan, Kerakyatan, dan Kebangsaan*, Lembaga Pengkajian Kebangsaan Republik Indonesia (LPKRI), Jakarta, 2013.

Internet

Asri Firmansyah, *Paradigma Kekuasaan*, http://www.kompasiana.com/www.beritafoto.com/paradigma-kekuasaan_550aae438133110078b1e257, akses 2 September 2015.

Syahrul Al-Walid, *Konflik dan Kekuasaan dalam Paradigma Kebangsaan* <http://sahruledsa.blogspot.co.id/2013/09/konflik-dan-kekuasaan-dalam-paradigma.html>, 2 September 2015.

DAFTAR PUSTAKA

- Asri Firmansyah, *Paradigma Kekuasaan*, http://www.kompasiana.com/www.beritafoto.com/paradigma-kekuasaan_550aae438133110078b1e257, akses 2 September 2015.
- Sahid Samawa, *Membumikan Teologi Kemansiaan dalam Kehidupan Bernegara*, Makalah, Jakarta, 12 Agustus 2014.
- Sofwan Idrus, *Kekuasaan, Kerakyatan, dan Kebangsaan*, Lembaga Pengkajian Kebangsaan Republik Indonesia (LPKRI), Jakarta, 2013.
- Syahrul Al-Walid, *Konflik dan Kekuasaan dalam Paradigma Kebangsaan* <http://sahruledsa.blogspot.co.id/2013/09/konflik-dan-kekuasaan-dalam-paradigma.html>, 2 September 2015.